



## **STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI PANGAN GUNA MENGURANGI KERAWANAN PANGAN DI SULAWESI TENGAH**

**Fachrul Reza<sup>1\*</sup>, Srifidayanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, STIA Pembangunan Palu, Indonesia

\*E-mail correspondence: [rezadakwah123@gmail.com](mailto:rezadakwah123@gmail.com)

### **A B S T R A K**

Setiap negara harus mulai merancang penyelesaian alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat dunia bisa terjamin. Tercapainya ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya dari satu sistem saja, tetapi terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mengurangi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai strategi *collaborative governance* dalam penerapan atau implementasi kebijakan diversifikasi pangan guna mengurangi tingkat kerawanan pangan di Sulawesi Tengah. Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai fakta yang ada di lapangan, guna menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah saling bersinergi melalui komunikasi ataupun koordinasi yang baik sesui dengan konsep *collaborative governance*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan upaya kolaborasi lintas sektor yakni dengan melakukan intervensi langsung ke daerah-daerah rawan pangan tersebut diantaranya yaitu berupa Inovasi Sektor Pangan yaitu Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu atau disingkat Tetra Pandu. Tercatat terdapat 20 (dua puluh) institusi yang aktif pada program inovasi tetra pandu tersebut. Selain itu masih terdapat hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi tengah, diantaranya adalah terkait pasokan pangan-pangan lokal non beras. Apakah kondisi pasokan pangan non beras yang ada tersebut mampu memenuhi permintaan pasar, terutama untuk konsumsi masyarakat, jika beras tidak lagi menjadi makanan pokok utama pilihan warga Sulawesi Tengah.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan; diversifikasi pangan; *collaborative governance*

### **ARTICLE INFO**

Received August 6, 2025

Revised October 16, 2025

Published November 30, 2025



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Warmadewa University

### **ABSTRACT**

*Every country must begin to design alternative solutions to achieve food security in order to ensure a sustainable quality of life for people around the world. The attainment of food security in Indonesia is not derived from a single system, but rather consists of various interrelated subsystems that interact and collaborate to reduce food vulnerability. This study aims to conduct an in-depth analysis of Collaborative Governance strategies in the implementation of food diversification policies to reduce the level of food insecurity in Central Sulawesi. The research employs a qualitative descriptive approach. Descriptive research is one of the methods used to understand or portray the reality of the phenomena*

*being studied. It seeks to describe or explain current events as they occur in the field, in order to generate data in the form of written and spoken words. The findings indicate that the Provincial Government of Central Sulawesi has established synergy through effective communication and coordination in accordance with the principles of Collaborative Governance. The provincial government has undertaken cross-sector collaboration efforts by implementing direct interventions in food-insecure areas, one of which is through the Food Sector Innovation Program, namely the Integrated Food Terminal and Transportation Innovation, abbreviated as Tetra Pandu. There are 20 (twenty) institutions actively participating in the Tetra Pandu innovation program. However, several challenges remain in achieving food security in Central Sulawesi, particularly concerning the supply of local non-rice food commodities. Questions arise regarding whether the existing supply of non-rice foods is sufficient to meet market demand, especially for household consumption, in the event that rice ceases to be the primary staple food of choice among the people of Central Sulawesi.*

**Keywords:** policy implementation; food diversification; collaborative governance

## 1. PENDAHULUAN

Krisis pangan sekarang ini telah menjadi topik global yang membutuhkan perlakuan serius dari semua pihak di dunia internasional. Setiap negara harus mulai merancang penyelesaian alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat dunia bisa terjamin. *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyatakan bahwa, kerawanan pangan global masih jauh lebih tinggi daripada tingkat sebelum pandemi COVID-19. Bahkan, sejak empat tahun terakhir, tingkat kerawanan pangan hampir tidak berubah, dengan sedikit perbaikan (Organi, 2024). Pada tahun 2023, berdasarkan estimasi menggunakan Skala Pengalaman Ketidakamanan Pangan (FIES) menyatakan bahwa 2.33 miliar orang berupaya untuk mendapatkan akses makanan yang cukup. Angka tersebut sudah termasuk 864 juta orang yang menghadapi kerawanan pangan yang parah.

Umumnya, terdapat berbagai faktor penyebab krisis pangan dunia, antara lain adalah adanya konflik atau perang, perubahan iklim, serta pertambahan populasi. Pesatnya pertumbuhan populasi penduduk juga menjadi salah satu isu yang menyebabkan kerentanan ketahanan atau keamanan pangan. Pesatnya pertumbuhan populasi dunia terutama disebabkan oleh tingginya angka kelahiran di negara-negara berkembang, seperti Afrika serta di beberapa negara Asia dan Amerika Selatan. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat krusial, khususnya bagi negara-negara yang jumlah penduduknya padat seperti Indonesia. Indonesia diprediksi memiliki jumlah penduduk sebanyak 324 juta pada tahun 2045 (Goodstats.id., 2024). Melonjaknya jumlah penduduk setiap tahunnya dan kecenderungan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang selalu mengkonsumsi beras sebagai menu pangan pokok utama tentunya bisa menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di Indonesia.

Secara umum, ketahanan pangan dikatakan membutuhkan empat syarat, yaitu pangan harus tersedia, harus dapat diakses (apakah bisa mudah dijangkau), harus digunakan dengan baik (disimpan, disiapkan, dan dimakan) untuk bisa merealisasikan tujuan ketahanan pangan sehingga dapat meningkatkan prioritas pembangunan (Hosseini et al., 2017). Selanjutnya Menurut Baliwati (2014) secara umum, ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*resilience*) dan waktu (*time*). Keempat aspek ketahanan pangan tersebut dipandang menjadi suatu sistem rangkaian dari tiga komponen

utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability* dan *stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan.

Tercapainya ketahanan pangan di Indonesia tidak hanya dari satu sistem saja, tetapi terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan menyangkut masalah produksi, stok, impor dan ekspor, yang harus dikelola sedemikian rupa, sehingga meskipun produksi pangan sebagian bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, pangan yang tersedia bagi keluarga harus cukup volume dan jenisnya, serta stabil dari waktu ke waktu. Selain itu, upaya lainnya agar ketahanan pangan tercapai yaitu dengan melakukan pengembangan diversifikasi pangan. Penganekaragaman pangan merupakan upaya membiasakan pola makan dan menu yang mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya pangan yang diolah sehingga kesejahteraan masyarakat akan gizi dan kecukupan pangan dapat dicapai. Penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas pangan saja, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai komoditas lain, seperti kentang, ubi jalar, ubi kayu, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Diversifikasi secara horizontal adalah upaya mengolah berbagai produk dari satu jenis komoditas tanaman pangan, baik produk jadi maupun setengah jadi.

Hingga kini, kekayaan hayati pangan lokal di Indonesia belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal agar dapat meminimalisir ketergantungan pangan, sedangkan disisi lain kebutuhan terus meningkat sehingga memaksa pemerintah untuk berupaya memenuhi kebutuhan akan pangan dengan melakukan impor yang pastinya menguras devisa. Ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap pangan pokok beras dengan kebutuhan yang terus meningkat berdampak pada keharusan pemenuhan dengan impor. Selain itu, melesatnya laju pertumbuhan produk pangan berbasis terigu dan tingginya preferensi konsumen terhadap produk tersebut berakibat membengkaknya impor gandum oleh Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, sesungguhnya kebijakan dan program diversifikasi konsumsi pangan sudah lama diterapkan, hanya saja belum memberikan progres signifikan pada peningkatan konsumsi pangan lokal. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya pengembangan atau penerapan diversifikasi konsumsi pangan lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata. Saat ini Data dari *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) menyebutkan bahwa terdapat daerah rawan pangan prioritas 1 (sangat rawan) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023. Diantaranya yaitu Desa Walandano di Kabupaten Donggala, Desa Labuan, Desa Toyado, Desa Silanca di Kabupaten Poso dan Desa/Pulau Bambu di Kabupaten Tojo Una-Una. Angka tersebut naik sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun sebelumnya 2022 (PPID Provinsi Sulawesi Tengah, 2024). Untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan, pemerintah daerah Sulawesi Tengah melakukan upaya pengembangan diversifikasi pangan. Salah satu upaya pemerintah provinsi Sulawesi tengah untuk mendukung ketersediaan pangan secara berkelanjutan adalah dengan mengembangkan pangan lokal seperti ubi banggai, jagung, pisang, sukun, talas ubi jalar, dan lain-lain.

Diversifikasi atau panganekaragaman pangan tidak dapat dilaksanakan hanya satu badan atau instansi saja. Dalam mendukung program pemerintah guna memperkuat program diversifikasi di daerah Sulawesi Tengah dan dihadapkan pada dinamika perkembangan

lingkungan dewasa ini yang erat dengan perubahan yang signifikan. Untuk itu, dibutuhkan upaya intervensi langsung ke daerah-daerah rawan pangan tersebut diantaranya berupa inovasi lintas sektor atau kolaborasi antar sektor. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemajuan pada kemampuan distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau dan sekaligus dapat menurunkan presentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah.

Urgensi penelitian ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi global dan nasional pasca-pandemi COVID-19 dan krisis pangan akibat perubahan iklim serta konflik geopolitik dunia yang mempengaruhi rantai pasok pangan (Rahman et al., 2023). Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan potensi agraris yang tinggi perlu memiliki strategi kebijakan yang adaptif dan kolaboratif dalam mengurangi kerawanan pangan. Diversifikasi pangan bukan hanya strategi teknis, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam membangun kemandirian pangan berbasis potensi lokal dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap risiko krisis pangan global.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai fakta yang ada di lapangan, guna menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Moleong (2017) mengatakan bahwa metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Keadaan dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data objektif dalam rangka mengetahui dan menganalisis *collaborative governance* pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kerawanan pangan di Sulawesi Tengah.

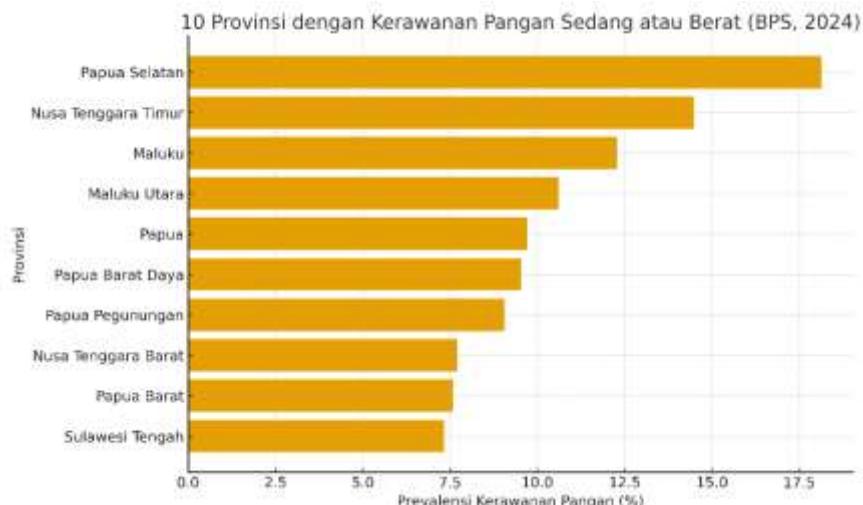
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam teknik studi literatur, terdapat tinjauan, rangkuman, dan pemikiran peneliti tentang berbagai sumber literatur seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, disertasi, berita dari internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Creswell, 2018). Penulis selanjutnya melakukan kajian terhadap artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan pertanyaan penelitian. Selanjutnya proses ikhtisar dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam setiap prosesnya dengan mengikuti semua tahapan yang telah ditentukan (E. Triandini, 2019). Penulis selanjutnya melakukan kajian secara detail terhadap artikel yang telah direview melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi rumusan pertanyaan penelitian, mencari dan memetakan artikel yang relevan dengan topik penelitian, menyaring dan menyeleksi artikel yang telah dipetakan, dan mengolah data dan menarik kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal krusial yang harus diupayakan. *Collaborative governance* merupakan salah satu jawaban atas persoalan ketahanan pangan saat ini, khususnya dalam kebijakan atau program diversifikasi pangan. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus secara aktif melibatkan sektor swasta

dan masyarakat lokal melalui serangkaian diskusi tentang ketahanan pangan, membangun kesepakatan bersama, dan membina komitmen kolektif untuk pencapaiannya. Indonesia selaku negara dengan kekayaan hayati yang tertinggi kedua setelah Brazil, memiliki sumber bahan baku pangan lokal yang melimpah. Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang menjadi sumber karbohidrat seperti serealia (jagung, sorgum, hotong, hanjeli, jawawut), aneka umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, garut, gembili, gadung, suweg, porang, uwu), aneka buah kaya pati (sukun, pisang, labu kuning), dan sagu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal (Widowati & Damardjati, 2001). Demikian juga halnya dengan komoditas sumber protein, baik yang sumber protein nabati maupun hewani.

Kerawanan pangan saat ini menjadi salah satu persoalan penting yang dihadapi oleh banyak negara-negara berkembang seperti Indonesia. 98% dari jumlah orang yang kelaparan di dunia tinggal di negara-negara berkembang. Jumlah orang yang kekurangan gizi tertinggi, 520 juta tinggal di Asia dan Pasifik, di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina (Mercycorps, 2020). Penyebab dari kerawanan pangan sangat kompleks dan bervariasi, diantaranya adalah akibat kemiskinan dan kurangnya akses ke pasar hingga konflik dan adanya ketidakstabilan politik. Di beberapa negara berkembang, petani kecil sangat rentan terhadap kerawanan pangan, hal tersebut disebabkan karena minimnya akses ke kredit, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan di negara-negara berkembang, praktik pertanian berkelanjutan, strategi kolaboratif lintas sektor, serta kebijakan diversifikasi pangan lokal sangat penting. Saat ini penduduk Indonesia berada dalam kelompok rawan pangan sedang dan tinggi. Seperti yang bisa dilihat dari grafik berikut ini:



**Grafik 1. 10 Provinsi dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat**

Sumber: Dikelola Penulis, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa Papua Selatan memiliki prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, sebanyak 18,13% penduduk Papua Selatan berada di kerawanan pangan sedang atau berat. Urutan kedua jatuh kepada Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan presentase 14,48%, ketiga oleh Maluku dengan persentase penduduk dalam kerawanan pangan sedang atau berat sebesar 12,28%. Maluku Utara menyusul setelahnya dengan 10,6%, Papua masuk ke dalam lima besar dengan prevalensi sebesar 9,71%, Papua Barat Daya berada di urutan ke enam dengan 9,53% penduduk berada di kategori kerawanan pangan sedang atau berat. Papua Pegunungan menyusul dengan 9,06%, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan prevalensi di angka 7,71%, Papua Barat masuk di posisi

kesembilan dengan angka prevalensi kerawanan pangan sebesar 7,58%. Sulawesi Tengah menutup sepuluh besar dengan prevalensi di angka 7,32% (Goodstats.id, 2024). Pada tahun 2004, peta rawan pangan (*Food Insecurity Map*) mengelompokkan tiga dimensi ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan penyerapan pangan. Hasil pengelompokan tersebut adalah kondisi sangat tahan pangan, kondisi cukup tahan pangan, kondisi agak rawan pangan, kondisi cukup rawan pangan hingga rawan pangan, kondisi rawan pangan, serta kondisi agak rawan pangan hingga rawan pangan. Dari hasil pengelompokan tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi tengah termasuk dalam kondisi agak rawan pangan dan rawan pangan (Sutrisno & Edris, 2009). Dengan kondisi tersebut tentunya pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis guna mengurangi tingkat kerawanan pangan di Sulawesi Tengah.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan adalah upaya kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, pebisnis hingga masyarakat dalam mendukung produksi, distribusi, dan edukasi terkait ketahanan atau kerawanan pangan. *Collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif dipandang sebagai salah satu pendekatan efektif dalam menyelesaikan konflik sosial melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan serta perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya *self-organization* di antara para pemangku kepentingan yang bersifat kreatif, deliberatif, dan saling memberikan manfaat (Thomson & Perry, 2016). Untuk mempercepat pencapaian target diversifikasi serta meningkatkan konsumsi pangan, dibutuhkan kerja nyata yang diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Selanjutnya, keberhasilan proses tata kelola kolaboratif dalam diversifikasi pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan di antara para pihak yang terlibat, serta koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan (Asran, 2018).

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hanya saja untuk mencapai ketahanan pangan yang maksimal, dibutuhkan upaya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan Satkowil. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan program-program yang mendukung kebijakan diversifikasi atau penganekaragaman pangan lokal di Sulawesi Tengah. Seluruh pihak harus mampu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi persoalan yang dihadapi petani dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan produksi pangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan akses yang mudah untuk petani agar mendapatkan bantuan dan dukungan dalam meningkatkan produksi pangan.

Berdasarkan data, sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah termasuk dalam kondisi agak rawan pangan dan rawan pangan. Pada tahun 2023 daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022. Menurut data dari *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan daerah rawan pangan (prioritas 1) meningkat sebanyak 25 kecamatan dari 4 kecamatan di tahun 2022. Kondisi kerentanan rawan pangan di Sulawesi tengah sendiri disebabkan oleh gabungan dari berbagai faktor dimensi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah yang masih tinggi. Salah satu dimensi tersebut, yaitu letak geografis daerah yang sulit diakses atau minim aksesibilitas karena infrastruktur yang belum mendukung, seperti daerah-daerah yang berada di kepulauan, pedalaman dan pegunungan sehingga menyebabkan ketersediaan,

keterjangkauan dan kemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) masih rendah.

Saat ini pemerintah provinsi Sulawesi tengah melakukan upaya kolaborasi lintas sektor yakni dengan melakukan intervensi langsung ke daerah-daerah rawan pangan tersebut diantaranya yaitu berupa Inovasi Sektor Pangan yaitu Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu atau disingkat Tetra Pandu. Tercatat terdapat 20 (dua puluh) institusi yang aktif pada program inovasi ini, yaitu Disbunnak Sulteng, Dinas Koperasi & UMKM Sulteng, Dinkes Sulteng, Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, DTPH Sulteng, DP2KB Sulteng, Disperindag Sulteng, DP3A Sulteng, Dinas Pangan Sulteng, Dinas Sosial Sulteng, Dinas Bima Tarung Sulteng, DKP Sulteng, Dinas Perhubungan Sulteng, Biro Perekonominian Setdaprov. Sulteng, UNTAD, BPSIT Sulteng, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai inisiator adalah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Fokus pelaksanaan program Tetra Pandu ini, dilaksanakan pada 5 (lima) desa sebagai Prioritas I (sangat rawan) yaitu Desa Walandano di Kabupaten Donggala, Desa Labuan, Desa Toyado, Desa Silanca di Kabupaten Poso dan Desa/Pulau Bambu di Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Sulteng No. 500.6.1/15.1/Bappeda-G.ST/2024 tentang Penetapan Desa Percontohan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu Tahun 2024. Dalam program Tetra Pandu tersebut terdapat 4 (empat) atau tetra konsep yaitu pertama, Terminal Pangan yang menjawab permasalahan tingginya harga pangan, rendahnya diversifikasi pangan dan meringkaskan tata niaga serta memotong rantai pasok tengkulak; kedua, Transportasi Pangan yang menjawab permasalahan pola distribusi pangan, kecukupan konsumsi pangan sesuai jumlah kalori perkapita, pemenuhan skor pola pangan harapan dan mempercepat akses pangan; ketiga, Keterpaduan Pangan yang menjawab permasalahan sektoral penanganan pangan, keterpaduan tugas dan fungsi penyediaan, ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan & pengawasan pangan serta; keempat, Keterpaduan Sasaran bahwa lokasi pilot project yang ditentukan adalah prioritas rawan pangan yang bersinggungan dengan daerah kemiskinan ekstrim, stunting, desa tertinggal dan lainnya. Program Tetra Pandu ini diharapkan bisa menjadi solusi terkait kondisi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah, khususnya mengenai distribusi pangan agar dapat sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau dan sekaligus dapat menurunkan presentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah.

Selain meluncurkan program inovasi Tetra Pandu, upaya lainnya yang diambil oleh pemerintah Sulawesi Tengah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan yaitu dengan menerapkan kebijakan diversifikasi atau penganekaragaman pangan. Dengan mengembangkan pangan lokal sebagai warisan budaya leluhur, seperti ubi banggai, jagung, pisang, sukun, talas ubi jalar, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai upaya diversifikasi pangan perlu terus didorong kepada masyarakat, agar potensi pangan lokal yang dimiliki daerah bisa dimaksimalkan penggunaannya. Sehingga dapat meningkatkan gizi masyarakat yang akan memberi kontribusi terhadap gerak cepat pembangunan menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan seperti sumber daya pertanian/tanaman pangan, sumber daya pertambangan dan penggalian serta sumber daya laut/perikanan. Sulawesi Tengah memiliki lahan yang subur dan iklim yang mendukung untuk pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Komoditas utama yang dapat diinvestasikan meliputi kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan buah-buahan tropis. Potensi pasar yang besar dan dukungan pemerintah yang kuat menjadikan investasi di sektor ini

menjanjikan. Sektor tanaman pangan diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berperan sebagai pemasok bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber pendapatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Pembangunan sektor pertanian terutama pengembangan subsektor tanaman pangan memberikan sumbangan atau kontribusi yang cukup besar pada pembangunan nasional.

Di sektor pertanian, tanaman pangan lokal cukup banyak ditanam di Sulawesi Tengah. Terdapat tujuh komoditas tanaman pangan menjadi unggulan guna mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari ketujuh komoditas tersebut, padi masih mendominasi produksi sebanyak 771.525 ton, kemudian disusul jagung 482.117 ton sepanjang 2022. komoditas tanaman pangan local di Sulteng cukup bervariatif, walaupun masih terdapat komoditas lain yang akan dikembangkan sesuai kebijakan nasional, seperti tanaman sorgum dan porang. Saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng juga mendorong pengembangan komoditas pangan alternatif seperti jagung, kedelai, dan ubi jalar. Langkah ini diambil sebagai strategi diversifikasi atau penganekaragaman pangan agar warga Sulawesi Tengah tidak hanya mengonsumsi beras saja. Saat ini pemerintah di seluruh kabupaten/kota di Sulteng untuk mengembangkan komoditas pangan lokal nonberas seperti pisang, kentang, jagung, ubi-ubian, sagu, dan labu. Di semua daerah di Provinsi Sulteng memiliki stok pangan lokal nonberas yang beragam.

### **Faktor Tantangan dan Hambatan Strategi *Collaborative Governance* dalam Mengurangi Tingkat Kerawanan Pangan di Sulawesi Tengah**

*Collaborative governance* antara Pemerintah dan berbagai sektor sangatlah berperan penting untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan di Sulawesi Tengah. Semua sektor baik pemerintah maupun swasta harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan pangan bagi semua lapisan masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi. Skema tata kelola atau *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Sulawesi Tengah terbentuk melalui interaksi dan koordinasi lintas level pemerintahan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah (PPID Provinsi Sulawesi Tengah, 2024). Tata kelola ini secara konseptual bertumpu pada prinsip kolaborasi antarsektor untuk mencapai tujuan bersama, yakni mengurangi tingkat kerawanan pangan dan memperkuat kemandirian pangan lokal.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam kebijakan dan program untuk mencapai ketahanan pangan, sedangkan memiliki peran dalam mendukung implementasi program ketahanan pangan di lapangan. Pada level pemerintah provinsi, peran utama diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tengah yang berfungsi sebagai koordinator kebijakan. Instansi ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kolaborasi di tingkat ini berfokus pada penyusunan arah kebijakan makro, sinkronisasi program lintas sektor, dan integrasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Strategi Nasional Ketahanan Pangan. Pemerintah provinsi juga bertugas memfasilitasi program lintas kabupaten serta memastikan adanya kesinambungan antara kebijakan strategis dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dari hasil pemetaan hubungan antaraktor, terdapat bentuk kerja sama (*collaborative model*) yang terbentuk dalam pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan di Sulawesi Tengah, yaitu Model Koordinatif (*Coordinative Collaboration*) koordinasi antara Pemerintah daerah dan berbagai instansi di Sulawesi Tengah dilakukan melalui berbagai program seperti peningkatan produksi pertanian, pengembangan sistem distribusi pangan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pendidikan dan pelatihan bagi petani dan peternak. Instansi seperti Dinas Pangan Sulteng dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dapat memberikan bantuan teknis dan logistik kepada petani dalam melakukan kegiatan pertanian yang berkelanjutan, serta memberikan perlindungan terhadap hasil pertanian dari ancaman seperti hama dan penyakit tanaman. Selain itu, Model Kemitraan Ekonomi dan Pasar (*Public-Private Partnership*) yaitu kolaborasi Pemerintah daerah dengan para pelaku usaha mikro dan kecil dalam sektor pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai pangan yang sehat dan bergizi, serta untuk memperluas akses pasar produk diversifikasi pangan. Misalnya, hasil olahan pangan lokal (keripik singkong, tepung sagu, tepung pisang) diserap oleh pasar modern dan toko oleh-oleh daerah. Dengan sinergitas yang baik antara kedua pihak, diharapkan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan diversifikasi pangan tidak selalu berjalan sesuai dengan desain kolaboratif yang diharapkan, karena masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan sinergitas antarlembaga belum terbangun secara efektif. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam mengatasi ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah terkait pasokan pangan-pangan lokal non beras. Apakah kondisi pasokan pangan nonberas yang ada tersebut mampu memenuhi permintaan pasar, terutama untuk konsumsi masyarakat, jika beras tidak lagi menjadi makanan utama. Akibat dari berbagai tantangan tersebut, efektivitas *collaborative governance* dalam menurunkan tingkat kerawanan pangan belum optimal. Program diversifikasi pangan telah berjalan, namun masih bersifat parsial dan sporadis antar wilayah. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (2024), Sulawesi Tengah masih berada di posisi ke-10 nasional dalam prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat (7,32% penduduk). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi dimensi utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, dan stabilitas. Tanpa mekanisme koordinasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem insentif dan data bersama yang transparan, kebijakan diversifikasi pangan berisiko menjadi seremonial tanpa dampak signifikan terhadap masyarakat rentan.

Untuk itu pemangku kepentingan perlu terus mengantisipasi dalam menghadapi tantangan-tantangan bukan hanya terkait ketersediaan atau pasokan pangan-pangan lokal nonberas, tetapi juga pasarnya harus mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya yang harus diambil oleh pemerintah yaitu terus melakukan sosialisasi agar produk olahan pangan lokal nonberas dikemas secara menarik agar laris dijual di pasaran. salah satu penyebab produk-produk pangan lokal kurang menarik bagi kalangan anak muda, salah satunya karena kemasan yang kurang menarik. Produk-produk makanan dari pangan lokal nonberas harus lebih menarik, pemerintah harus mengupayakan agar produk makanan lokal mampu bersaing dengan produk-produk makanan dari luar. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ketahanan pangan di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam program-program ketahanan pangan, maka akan tercipta sinergitas yang kuat antara Pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dan masyarakat

dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik serta komunikasi yang efektif, maka tidak akan ada hambatan yang tidak bisa diatasi dalam mencapai tujuan ketahanan pangan sekaligus mengurangi tingkat kerawanan pangan di Sulawesi Tengah.

#### **4. SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara aktif melibatkan seluruh sektor baik sektor swasta dan masyarakat lokal melalui serangkaian kerjasama tentang ketahanan pangan dan membina komitmen kolektif untuk pencapaiannya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan upaya kolaborasi lintas sektor yakni dengan melakukan intervensi langsung ke daerah-daerah rawan pangan tersebut diantaranya yaitu berupa Inovasi Sektor Pangan yaitu Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu atau disingkat Tetra Pandu. Tercatat terdapat 20 (dua puluh) institusi yang aktif pada program Inovasi Tetra Pandu tersebut. Namun, kerangka kolaborasi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi dimensi utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, dan stabilitas. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah, diantaranya adalah terkait pasokan pangan-pangan lokal non beras. Apakah kondisi pasokan pangan nonberas yang ada tersebut mampu memenuhi permintaan pasar, terutama untuk konsumsi masyarakat, jika beras tidak lagi menjadi makanan pokok utama pilihan warga Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah perlu terus mengantisipasi dalam menghadapi tantangan-tantangan bukan hanya terkait ketersediaan atau pasokan pangan-pangan lokal nonberas, tetapi juga pasarnya harus mendapat perhatian dari pemerintah.

#### **5. REFERENSI**

- Asran. (2018). Collaborative Governance (Studi Kasus Pada Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS) dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Baliwati, Y. F. (2014). Pengantar Pangan dan Gizi, Cetakan I. Jakarta. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Creswell, J. W. (2018). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E. Triandini, S. J. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesia Journal of Information System*, 1(2).
- Goodstats.id. (2024). 2045, Indonesia Diprediksi Bakal Punya 324 Juta Penduduk. <https://goodstats.id/article/2045-indonesia-diprediksi-bakal-punya-324-juta-penduduk-RGAPj>
- Goodstats.id. (2024). 10 Provinsi dengan Kerawanan Pangan Tertinggi di Indonesia. <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kerawanan-pangan-tertinggi-di-indonesia-oCDUh>
- Hosseini, S. S., Pakravan Charvadeh, M. R., Salami, H., & Flora, C. (2017). The impact of the targeted subsidies policy on household food security in urban areas in Iran. *Cities*, 63, 110–117. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.01.003>
- Mercycorps. (2020). Fakta: Apa yang perlu Anda ketahui tentang kelaparan global.

- [https://www-mercycorps-org.translate.goog/blog/facts-global-hunger?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Kelaparan%20di%20negara%20berkembang,karena%20meningkatnya%20dampak%20perubahan%20iklim](https://www-mercycorps-org.translate.goog/blog/facts-global-hunger?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Kelaparan%20di%20negara%20berkembang,karena%20meningkatnya%20dampak%20perubahan%20iklim) di negara berkembang, karena meningkatnya dampak perubahan iklim.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Organisasi, "Food and Agriculture Organization. (2024). Memahami Kerawanan Pangan. <https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/en/>
- PPID Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). Program Inovasi Tetra-Pandu 2024: Upaya Menurunkan Persentase Daerah Rawan Pangan di Sulteng. <https://ppid.sultengprov.go.id/2024/04/29/program-inovasi-tetra-pandu-2024-upaya-menurunkan-persentase-daerah-rawan-pangan-di-sulteng/>
- Rahman, J. Y., Rachmawati, R. N., Nugraha, A. M., & Widjanarko, F. T. (2023). The influence of climate change and country-based conflict on crop production: Evidence based on global panel data in the last decade. Desimal: Jurnal Matematika, 6(2), 231. <https://doi.org/10.24042/djm.v6i2.18928>
- Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, S., & Edris, I. M. (2009). Reaktualisasi Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pangan, 18(56), 45–58. <http://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/218>
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2016). Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public Administration Review, 66(1), 20–32.
- Widowati, S., & Damardjati, D. S. (2001). Menggali Sumber daya Pangan Lokal Dalam Rangka Ketahanan Pangan. Majalah Pangan, 3–11.